

Judul : DPR soroti pelatihan mental di BPJS naker
Tanggal : Rabu, 05 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Jangan Abaikan Keselamatan DPR Soroti Pelatihan Mental Di BPJS Naker



Vita Ervina

ANGGOTA Komisi IX DPR Vita Ervina menyoroti penggunaan metode *fire walk* atau berjalan di bara api dalam pelatihan calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan. Upaya institusi membangun keberanian patut diapresiasi, tapi pembentukan mental pegawai tidak boleh mengesampingkan prinsip manajemen risiko keselamatan.

Sebagai penyelenggara jaminan sosial, kata Vita, BPJS Ketenagakerjaan wajib jadi teladan utama penerapan standar keselamatan pada setiap aktivitasnya. Itu termasuk seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai. Seluruh proses pembinaan harus mencerminkan budaya keselamatan kerja.

Menurutnya, metode pelatihan mestinya punya relevansi serta dampak pada kualitas pelayanan publik. Karena kualitas BPJS Ketenagakerjaan diuji melalui kinerja nyata. "Ketahanan fisik melintasi rintangan ekstrem bukan yang utama," tegasnya, Senin (3/8/2026).

Dia bilang, keberhasilan calon pegawai tidak ditentukan dari keberanian melewati bara api, melainkan oleh integritas pengelolaan amanah dan profesionalisme. Indikator utamanya adalah kecepatan serta kualitas pelayanan bagi peserta. Setiap pekerja harus

dipastikan mendapatkan hak perlindungan secara optimal.

Dia menyebut, dalam praktiknya perlindungan pekerja disalurkan melalui lima program utama. Yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). DPR mendukung inovasi SDM yang terukur dan mengedepankan keselamatan.

Keberanian simbolis, sambungnya, tidak boleh mengabaikan esensi utama dari pelayanan publik itu sendiri. Kekuatan institusi dibangun melalui budaya kerja profesional dan berintegritas. "Konsistensi menghadirkan pelayanan terbaik jadi fondasi sesungguhnya dalam menjaga kepercayaan masyarakat," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menambahkan, metode pelatihan ekstrem yang dilakukan tidak memiliki korelasi langsung dengan tugas pokok fungsi. Ironisnya, pelatihan fisik di luar batas kewajaran kerap diadopsi lembaga negara. Karena itu, praktik semacam itu harus segera dievaluasi.

Dia mendesak manajemen BPJS Ketenagakerjaan memberikan penjelasan resmi dan transparansi mengenai tujuan kegiatan ekstrem itu. Relevansi pengembangan kompetensi calon pegawai perlu diperjelas. Pelatihan ini diharapkan tidak dijadikan acuan standar bagi lembaga lain.

Kekhawatiran mendalam timbul apabila model pelatihan fisik berisiko tinggi ini terus dinormalisasi. Indonesia pernah mencatat preseden buruk tatkala pelatihan serupa berujung jatuhnya korban jiwa. "Seluruh kegiatan pengembangan pegawai wajib relevan dengan tugas pelayanan," jelasnya. ■ PYB